

Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran Di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas

Indrianti Dwi Erlita Sari*, Indy Agnestika, Oki Anggraeni, Dijan Rahajuni

Pendidikan Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman, Kec.Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122, Indonesia

*) Correspondence: indrianti.sari@mhs.unsoed.ac.id

Edukasi IPS

Volume 8, Issue 1 (2025)

E-ISSN : 2620-8768



Received : 6 June 2025

Accepted : 10 July 2025

Published : 10 July 2025

Abstract

This study examines efforts to address unemployment in Pliken Village, Kembaran District, Banyumas Regency. Unemployment is one of the social problems that has broad impacts on community life, both economically and psychologically. This research employed a descriptive qualitative approach, conducted through in-depth interviews with the Village Head and the Head of the Service Section as the main informants. The results show that the village government has implemented various community empowerment programs, including skills training, the establishment of MSME associations, the organization of joint markets, and collaboration with regional government agencies. These programs are considered effective in creating new job opportunities, increasing community income, and significantly reducing the unemployment rate. The main obstacles faced are limited budget allocations and the prioritization of poverty alleviation programs for the elderly. Therefore, a strategic approach to sustainable village economic development is required, based on local potential and the strengthening of institutions such as Village-Owned Enterprises (BUMDes) and village cooperatives. The findings emphasize the importance of the active role of the village government in building an independent and adaptive economic ecosystem as a long-term solution to unemployment problems.

Keywords: *Unemployment; Village Government; Community Empowerment*

1. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu tantangan krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, baik di tingkat kota maupun desa. Pengangguran tidak hanya diartikan sebagai tidak adanya pekerjaan, tetapi juga mencakup kondisi tersembunyi di mana individu memiliki aktivitas ekonomi yang tidak

mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Menurut Sukirno (2004:28), pengangguran didefinisikan sebagai kondisi ketika tenaga kerja aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Istilah ini juga mencakup mereka yang sama sekali tidak bekerja, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang berusaha memperoleh pekerjaan yang layak. Bentuk pengangguran seperti ini kerap terjadi di desa-desa, namun tidak tercatat dalam data statistik formal. Novriansyah (2018) juga menjelaskan bahwa pengangguran jelas merupakan masalah yang sulit untuk diperiksa dan sangat penting karena dapat dikaitkan dengan berbagai indikator seperti kemajuan ekonomi suatu negara, angka inflasi, besaran upah, dan tingkat kemiskinan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang cepat diharapkan dapat mengurangi Tingkat pengangguran di sebuah negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan, pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru.

Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama pengangguran. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan sosial, hingga potensi gangguan keamanan di wilayah tertentu. Sukirno (2006) juga mengatakan bahwa pengangguran adalah masalah yang dapat berdampak pada ekonomi dan masyarakat. Pengangguran mempengaruhi ekonomi negara secara keseluruhan, bukan hanya mereka yang kehilangan pekerjaan. Penelitian Azzahra et al. (2024) mengungkapkan bahwa pengangguran menyebabkan banyaknya orang yang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan merampok, hal ini juga dapat berdampak pada tingkat kejahatan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan akan membuat mereka merasa tidak percaya diri, putus asa, dan depresi, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan biaya sosial karena mereka harus membayar perawatan pasien depresi. Penelitian Cut Nova Rianda (2020) juga mengungkapkan bahwa pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena peningkatan angka pengangguran menyebabkan negara kehilangan barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang signifikan karena menyebabkan banyak kesulitan bagi pekerja yang menganggur karena mereka harus berjuang untuk mempertahankan pendapatan mereka. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, pengangguran juga mempengaruhi aspek psikologis, kepercayaan diri, hingga relasi sosial individu. Oleh karena itu, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi menjadi persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Melihat keadaan tersebut di atas pemerintah terutama pemerintah daerah tidak berpangku tangan. Pemerintah daerah selama ini sudah memberikan berbagai macam bantuan yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Diantaranya: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras agar masyarakat miskin dapat hidup dengan layak. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan bantuan berupa PIP kepada anak sekolah dari keluarga miskin supaya memperoleh Pendidikan, mereka juga mendapatkan Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin). Berbagai macam bantuan yang digulirkan oleh pemerintah daerah itu tidak mengurangi angka pengangguran. Karena jenis bantuan di atas hanya bersifat konsumtif.

Oleh karena itu pemerintah daerah disamping memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, juga memberikan bantuan yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Dalam hal ini pemerintah daerah membantu desa-desa yang terdapat di Kabupaten Banyumas untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan berkurangnya angka pengangguran otomatis meningkatnya ekonomi rakyat. Bantuan yang dapat diberikan bisa berupa pelatihan keterampilan, penyediaan modal untuk usaha, Pembangunan infrastruktur serta pengembangan potensi lokal seperti pertanian, pariwisata dan UMKM.

Sebagai contoh Desa Pliken tepatnya di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas terdapat banyak sekali rumah produksi tempe. Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah yang banyak memiliki sumber daya manusia sebagai produsen tempe. Desa ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tempe terbesar di Banyumas dan memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada produksi tempe. Sebagian besar penduduk Desa Pliken bergantung pada produksi tempe sebagai mata pencaharian mereka (Dewi et al., 2024). Produksi tempe tidak hanya membuat kedelai mentah tetapi menjadi makanan yang memiliki nilai jual tinggi, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Berbagai tahapan proses produksi, mulai dari persiapan bahan baku, fermentasi, hingga pengemasan, membuka peluang bagi usaha rumahan dan industri kecil untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal. Industri tempe diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat melalui dukungan pelatihan, akses ke permodalan, dan fasilitasi pasar oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami dan menilai seberapa besar peran pemerintah desa dalam mengurangi pengangguran di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh program-program yang telah dilaksanakan di daerah tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam peran Pemerintah Desa dalam upaya menanggulangi pengangguran di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara menyeluruh terkait dengan kebijakan, strategi, serta implementasi program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kasi Pelayanan Desa Pliken, karena mereka memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman yang relevan mengenai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk mengatasi pengangguran di desa tersebut. Kedua tokoh ini juga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa, sehingga dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel dan representatif. Alasan pemilihan informan ini adalah karena mereka mengetahui secara langsung berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah desa, termasuk kerja sama dengan instansi terkait, pelatihan keterampilan, dukungan untuk UMKM, serta strategi pembangunan ekonomi lokal lainnya. Validasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berada di Kantor Balai Desa Pliken untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi

3. Hasil dan Pembahasan

Pengangguran adalah situasi dimana individu yang telah mencapai usia kerja ingin memiliki pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Kategori pengangguran hanya mencakup orang-orang yang telah berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, jadi anak usia sekolah, ibu rumah tangga, serta anak-anak dari keluarga kaya yang tidak bekerja dan tidak aktif dalam mencari pekerjaan, tidak termasuk dalam kategori pengangguran (Sukirno, 2012). Pengangguran merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya lapangan kerja, tetapi juga dengan keterbatasan kapasitas individu, lemahnya akses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal secara

terstruktur. Fenomena ini tampak nyata di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di mana angka pengangguran meningkat seiring dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat sebagian warga bekerja, dan minimnya sumber daya manusia yang siap kerja.

Kirana dan Basyarudin (2020) mengatakan bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh para pekerja, karena umumnya terjadi akibat kontrak kerja yang berakhir atau pengurangan karyawan. PHK tidak hanya berdampak pada individu secara ekonomi, tetapi juga berpotensi pada meningkatnya tingkat pengangguran di suatu wilayah apabila tidak disertai dengan strategi mitigasi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk melihat pengangguran sebagai dampak sistemik dari proses PHK yang tidak dikelola secara menyeluruh. Pengembangan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi langkah krusial untuk mengurangi dampak negatif dari PHK. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Pliken mengambil langkah progresif yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga mulai mengarahkan kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, salah satu inisiatif penting yang dilakukan Pemerintah Desa adalah pembentukan paguyuban UMKM yang menjadi wadah warga untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro. Paguyuban ini tidak hanya difungsikan sebagai kelompok usaha, tetapi juga sebagai ruang belajar, kolaborasi, dan penguatan solidaritas ekonomi di tingkat komunitas. Hal ini sejalan dengan penelitian Praptitorini et al. (2023), yang menyatakan bahwa, paguyuban UMKM dapat menjadi wadah efektif bagi pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dalam pemasaran, perizinan, keuangan, serta peningkatan kapasitas melalui fasilitator berpengalaman. Dengan demikian, diharapkan terbentuk ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa di Desa Pliken, keberadaan paguyuban UMKM memang memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Untuk mendukung keberadaan paguyuban tersebut dalam menggerakkan ekonomi lokal, Pemerintah Desa sering kali mengadakan kegiatan Pasar Bersama di titik sentral desa, yaitu Tugu Tempe. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran produk, tetapi juga terbukti mampu meningkatkan pendapatan warga, memperluas jaringan pasar, dan memperkenalkan produk lokal Desa Pliken kepada masyarakat luar. Keberadaan pasar ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial karena menjadi tempat bertemunya pelaku usaha, konsumen, dan warga yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas dapat menjadi jalan alternatif yang efektif dalam penanggulangan pengangguran di tingkat desa.

Selain menciptakan ruang ekonomi melalui paguyuban UMKM dan kegiatan Pasar Bersama, Pemerintah Desa juga secara aktif memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Program pelatihan yang diberikan antara lain meliputi pelatihan perbengkelan, pelatihan tata rias (MUA), pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga, hingga produksi ekoenzim. Pelatihan ini difasilitasi melalui kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kriteria penerima pelatihan juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan prioritas diberikan kepada warga berpenghasilan rendah. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan capaian yang signifikan, di mana sejumlah peserta telah membuka usaha mandiri dan mulai menghasilkan pendapatan sendiri. Misalnya, salah satu peserta pelatihan tata rias kini telah membuka jasa rias pengantin dan mendapat permintaan layanan secara rutin dari warga sekitar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian

Mannahali et al. (2024) yang menyatakan bahwa pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang diselenggarakan bagi masyarakat pedesaan terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, serta kemandirian ekonomi peserta, sehingga menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Selain pelatihan keterampilan dan penguatan UMKM melalui paguyuban, sektor ekonomi tradisional seperti produksi tempe juga masih menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di Desa Pliken. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Harjito, mayoritas pelaku usaha tempe berasal dari keluarga pengrajin yang telah menjalankan usaha ini secara turun-temurun. Regenerasi usaha terjadi secara alami, di mana orang tua yang sudah lanjut usia akan mewariskan usaha tempe kepada anak-anaknya. Pola ini menjadikan industri rumahan tempe tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem sosial dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Kusmulyono (2023), yang menyoroti dinamika keberlanjutan ukm keluarga di pedesaan, di mana usaha keluarga memainkan peran penting dalam mempertahankan ekonomi lokal melalui warisan usaha lintas generasi. Namun, pelaku usaha tempe juga menghadapi tantangan, seperti naiknya harga kedelai dan menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi global, yang berdampak pada pengurangan jumlah produksi atau bahkan terhentinya aktivitas berdagang pada waktu tertentu.

Meskipun menghadapi tekanan tersebut, sektor ini tetap bertahan karena telah melekat sebagai identitas lokal dan sumber penghidupan utama. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak hanya mengamati, tetapi juga aktif mendorong penguatan usaha melalui proses legalisasi seperti penerbitan izin usaha dan sertifikasi halal, serta promosi usaha yang kini mulai dilakukan masyarakat melalui media sosial. Fasilitasi tersebut sebagian dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, yang informasinya kemudian disampaikan kepada masyarakat desa. Upaya tersebut mencerminkan bahwa sektor informal seperti industri tempe di Desa Pliken bukan hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan potensi untuk tumbuh jika terus didorong melalui program yang terarah. Temuan ini diperkuat oleh temuan Zairina dan Wafa (2023), yang menekankan pentingnya penguatan legalitas usaha dan digitalisasi pada umkm untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar, terutama di wilayah pedesaan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Pemerintah Desa masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran. Prioritas belanja desa yang masih dominan dialokasikan untuk penanganan kemiskinan usia lanjut menyebabkan program pelatihan kerja untuk usia produktif belum bisa berjalan secara optimal. Menyadari keterbatasan tersebut, pemerintah desa mulai menyusun strategi jangka panjang berupa pembangunan pasar tradisional, pusat kuliner, ruko usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penguatan kelembagaan desa melalui BUMDes menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tui et al. (2021), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes merupakan salah satu sarana strategis untuk menyalurkan inisiatif masyarakat, mengembangkan potensi desa, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa secara optimal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ekonomi lokal tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi pondasi dalam menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan di desa.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas tantangan pengangguran muda, pemerintah desa juga mulai melakukan pemetaan terhadap anak-anak usia produktif yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Tujuannya adalah untuk mengarahkan mereka ke pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan kondisi lokal, sehingga mereka tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Hal ini menunjukkan pendekatan yang adaptif dan berbasis data, di mana kebijakan dirancang tidak secara umum, tetapi diarahkan pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Dari berbagai inisiatif dan program yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pliken telah menjalankan perannya secara aktif dan strategis dalam penanggulangan pengangguran. Peran tersebut melampaui fungsi administratif semata, dan telah berkembang menjadi fasilitator pembangunan ekonomi lokal yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi komunitas. Pemerintah desa tidak hanya hadir sebagai pelaksana program dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pemikir kebijakan mikro yang menjawab permasalahan desa dengan cara-cara yang relevan dan kontekstual. Hal ini selaras dengan pandangan Siagian (2000), yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam proses Pembangunan melalui fungsi-fungsi seperti stabilisasi, inovasi, modernisasi, serta pelaksanaan proyek strategis. Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah desa mencerminkan Kumpulan Tindakan, tanggungjawab, dan fungsi yang dijalankan sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial dan kenegaraan untuk mencapai tujuan Pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pliken dalam menanggulangi pengangguran menunjukkan wujud nyata dari fungsi tersebut, yakni mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan kebijakan lokal secara aktif dan dinamis guna menciptakan kesejahteraan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat yang terorganisir untuk mengurangi pengangguran. Berbagai upaya seperti pelatihan keterampilan kerja, pembentukan paguyuban UMKM, penyelenggaraan pasar bersama, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah telah berhasil membuka lapangan kerja baru, memperkuat perekonomian lokal, serta mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Pemerintah desa menjalankan perannya secara aktif dan partisipatif, tidak terbatas pada fungsi administratif semata, melainkan dengan menjalin kolaborasi antara masyarakat, lembaga desa, serta instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dijumpai, khususnya terkait dengan keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan yang lebih banyak diarahkan pada penanggulangan kemiskinan usia lanjut. Untuk itu, dibutuhkan strategi jangka panjang yang berbasis data, pemetaan potensi lokal, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan koperasi sebagai penggerak ekonomi mandiri.

Secara umum, keberhasilan Pemerintah Desa Pliken dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran menunjukkan pentingnya pendekatan lokal yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada potensi yang dimiliki desa. Pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi desa-desa lainnya dalam mengembangkan sistem penanggulangan pengangguran yang bersifat berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Dewi, C. K., Rimbun, C. H., Adhini, N. S., Sipahutar, D. A., & Anwar, T. (2024). Media 2024 Optimasi Manajemen Rantai Pasok Tempe Dengan Pendekatan EOQ Di Desa Pliken Banyumas. 4(1), 1124–1132.
- Firnawati, Muhammadiyah, & Ansyari, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 238–250.

- Ilal, G., Rorong, I., & Tumangkeng, S. (2024). Analisis Kebijakan Program Kartu Prakerja Dalam Penurunan Pengangguran di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(2), 85–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/53734>
- Kirana, Y., & Basyarudin. (2020). Analisis Pengaruh Pengangguran Disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IV(1), 51–60.
- Kusmulyono, M. S. (2023). the Dynamics of Family-Owned Sme Sustainability in Rural Areas [Dinamika Keberlanjutan Ukm Keluarga Di Pedesaan]. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 18(2), 157–165. <https://doi.org/10.19166/derema.v18i2.6727>
- Lobbu, D. N., J.Lengkong, F. D., & D.Pombengi, J. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Mannahali, M., Asri, W. K., Fatimah, S., Azizah, L., & Angraeny, F. (2024). Pemberdayaan Ekonomi : Pelatihan Kewirausahaan dan Keterampilan untuk Masyarakat Pedesaan. *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(02), 294–300.
- Nasution, R., & Marliyah, M. (2023). Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *Jesya*, 6(1), 810–823. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>
- Nurahman, A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2559>
- Nurul Zairina, & Zaenal Wafa. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4121–4128.
- Praptorini, M. D., Yuswono, I., Turmudhi, A., Ristianawati, Y., & Shobandiyah, S. (2023). Pembentukan Paguyuban Umkm Sebagai Upaya Membangun Ekosistem Umkm Yang Berkelanjutan Di Desa Pagak, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara Mirna. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat PAKEM*, 5(2), 15–21.
- Rianda, C. N. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>
- Siti Fatimah Azzahra, Lystiana Dewi Putri, Fachriza Yunanda Purba, Dahri Tanjung, Ajeng Rezkita Putri, & Ratu Zaskia Daimatul Zulva. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Stabilitas Sosial Dan Perekonomian Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 220–233. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.719>
- Tui, F. P., & Ilato, R. (2022). Penguatan Potensi Kelembagaan Desa Menuju Percepatan Pencapaian Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(2), 331–347. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i2.12134>